

## INTISARI

**Latar Belakang:** Jaminan Kesehatan Daerah pengelolaannya dilebur ke BPJS Kesehatan setelah diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014. Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang bagian dari Kabupaten yang menggabungkan kepesertaan jaminan kesehatan daerah ke BPJS Kesehatan. Kabupaten Kayong Utara mengasuransikan penduduk ke BPJS Kesehatan kecuali yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Peserta PBI Daerah Kabupaten Kayong Utara mencapai 35,3% dari total penduduk 99.256 jiwa. Kabupaten Ketapang mengasuransikan penduduk tidak mampu ke BPJS Kesehatan sebanyak 4,2% dari total penduduk 386.465 jiwa. Dalam pelaksanaan tata kelola PBI daerah perlu didukung regulasi yang memadai, visi stakeholder yang kuat, komunikasi antara stakeholder yang selaras dengan kebijakan pemimpin daerah.

**Tujuan:** Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kemampuan stakeholder dalam menjalankan tata kelola kepesertaan PBI Daerah Jaminan Kesehatan Nasional.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan *realist evaluation* dengan rancangan studi kasus deskriptif. Penelitian menggunakan *purposive sampling*, subjek penelitian berjumlah 24 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen.

**Hasil:** Pelaksanaan Program JKN merupakan kebijakan strategis. Kabupaten Kayong Utara mengasuransikan penduduk mampu dan tidak mampu di BPJS Kesehatan sementara Kabupaten Ketapang hanya penduduk tidak mampu atau miskin. Berdasarkan hipotesis CMO, (*Context*) pengelolaan peserta PBI direspon berbeda di kedua kabupaten. Dalam pelaksanaan pengaruh regulasi yang tidak komprehensif menyebabkan Pengelolaan PBI Daerah daerah belum baik di kedua kabupaten tersebut, visi strategis yang tidak disertai dengan rencana strategis dan komunikasi parsial (*mechanism*) berkontribusi terhadap hasil atau dalam kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (hasil).

**Kesimpulan:** Pemerintah Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola jaminan kesehatan bagi penduduk yang tidak mampu. Pelaksanaan PBI Daerah di kedua Kabupaten menghadapi tantangan dalam bentuk regulasi yang belum menyeluruh. Regulasi yang komprehensif, target yang jelas, dan koordinasi di lintas struktus diperlukan dalam pengelolaan PBI Daerah di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang agar dapat terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** Kepesertaan, Tata Kelola, PBI Daerah, *Realist Evaluation*

## ABSTRACT

**Background:** Regional Health Insurance management was merged into BPJS Kesehatan after the implementation of the 2014 National Health Insurance program. Kayong Utara Regency and Ketapang Regency are part of Districts that combine regional health insurance membership to BPJS Kesehatan. Kayong Utara Regency ensures the population for BPJS Kesehatan except for those already registered with BPJS Kesehatan. Participants of the PBI Region of Kayong Utara Regency reach 35.3% of the total population of 99,256 people. Ketapang Regency ensures the poor population to BPJS Health as much as 4.2% of the total population of 386,465 people. In implementing regional PBI governance, it is necessary to support adequate regulations, a strong stakeholder vision, and communication between stakeholders that is in line with the policies of local leaders.

**Aim:** The general objective of this study is to explore the ability of stakeholders in carrying out the management of PBI Regional National Health Insurance.

**Method:** This study uses a realist evaluation approach with a descriptive case study design. The research used purposive sampling, the research subjects were 24 people. Data collection was carried out by in-depth interviews and document review.

**Result:** Implementation of the JKN Program is a strategic policy. Kayong Utara Regency insures the poor and the poor at BPJS Kesehatan while Ketapang Regency only covers the poor or poor. Based on the CMO hypothesis, (Context) PBI participant management responded differently in the two districts. In the implementation of the incomplete influence of regulations, the management of regional PBIs is not good in the two districts, a strategic vision that is not accompanied by a strategic plan and partial communication (mechanism) contributes to the results or in ensuring health insurance for the poor (outcome).

**Conclusion:** The Kayong Utara and Ketapang District governments have a strong commitment to managing health insurance for the poor. The implementation of Regional PBIs in both districts faces challenges in the form of incomplete regulations. Comprehensive regulations, clear targets, and coordination across structures are needed in the management of the Regional PBI in Kayong Utara and Ketapang Regencies so that they can be implemented properly.

**Keywords:** Participation, Governance, Regional PBI, Realist Evaluation